INDO POS

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Anggaran 'Siluman' Sulit Diendus

Berkat Kerjasama Oknum Dinas-Dewan, ICW Duga Lebih Rp 12,1 Triliun

POLEMIK antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Jakarta terus meluas. Usai *deadlock* dalam mediasi yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 terkait dugaan anggaran 'siluman' makin jauh penyelesaiannya.

Dengan buntunya mediasi terkait tudingan adanya anggaran 'siluman' dalam RAPBD DKI 2015 sebesar Rp 12,1 triliun itu membuat polemik pengesahan RAPBD DKI 2015 makin tidak jelas. Ternyata, anggaran 'siluman' itu bukan hanya terjadi tahun ini.

Tahun-tahun sebelumnya, anggaran 'siluman' ternyata juga banyak terjadi di APBD DKI 2015.

Selain kasus itu sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Gubernur Basuki, Jumat (27/2) lalu, kini Polda Metro Jaya melalui Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) tengah menyelidiki salah satu dugaan proyek 'siluman' dalam bentuk pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) senilai Rp 330 miliar dalam APBD DKI 2014.

Bahkan, beberapa pengamat anggaran menduga angka dana 'siluman' dalam APBD DKI yang selama ini disebut Gubernur Ahok berjumlah Rp 12,1 triliun diperkirakan bisa lebih besar lagi. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran, Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mengatakan pihaknya tengah meneliti anggaran yang ada dalam APBD DKI 2015.

"Hasil penelitian nanti, bisa saja menyebutkan angka anggaran 'siluman' APBD DKI 2015 itu lebih dari Rp 12 triliun seperti yang selama ini diungkap Gubernur Ahok," terangnya kepada INDOPOS, Rabu (4/3) lalu. Dia juga menjelaskan, masuknya dana siluman itu karena ada beberapa celah. Salah satunya aliran dana 'siluman' itu bisa masuk saat perumusan anggaran.

Dana itu bisa masuk saat nota keuangan sementara dan pagu platform anggaran yang dibahas eksekutif bersama DPRD. Kemudian, ujarnya juga, ketika dalam rapat paripurna pembahasan anggaran tidak disepakati, akan ada anggaran yang berbeda dengan yang diusulkan pemerintah daerah.

Di sana, kata Firdaus juga, akan kembali muncul anggaran siluman. Selanjutnya, jika dilihat secara netral, munculnya anggaran siluman itu berasal dari semua lini. Baik dari sisi eksekutif, seperti di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kalau di legislatif berasal dari setiap komisi dan badan anggaran. "Dalam proses itu, anggaran 'siluman' bisa disusupkan ke anggaran yang tidak diusulkan SKPD," terangnya.

Sementara itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang menduga ada permainan antara pejabat dinas Pemprov DKI Jakarta dan anggota drawn di balik temuan anggaran siluman yang saat ini membuat panas hubungan gubernur dan DPRD DKI. "Saya hanya menggambarkan kemungkinan permainan antara komisi DPRD dan dinas terkait. Ada program-program yang disusun oleh dinas terkait, tetapi titipan dari DPRD," terangnya.

Dia menduga kongkalingkong antara pejabat dinas dan anggota DPRD terkait anggaran dilakukan saat pembahasan mengenai proyek apa saja yang akan diusulkan. Dalam situasi tersebut, kata dia juga, anggota DPRD memang berhak mengusulkan pengadaan proyek.

Dalam proses memuluskan proyeknya, kata Salang lagi, para anggota DPRD DKI bisa saja mengancam pejabat dinas.

Ancaman yang dilontarkan adalah ancaman untuk memotong anggaran proyek yang diajukan oleh dinas yang bersangkutan. "(Titipan) bisa sebelum penyusunan anggaran oleh dinas terkait, bisa juga saat pembahasan. Dewan menitipkan, bila tidak disetujui, anggaran dari dinas terkait akan dipotong," terangnya.

Misalnya, ujar pria yang akrab disapa Salang ini, ada suatu dinas yang awalnya mengajukan penggunaan anggaran Rp 25 triliun, dipotong hanya Rp 5 triliun-Rp 10 triliun. "Sering kali yang terjadi begitu," jelasnya. Lebih lanjut katanya juga, kasus korupsi melalui proyek yang diselipkan pada rancangan APBD tergolong kasus yang sulit diendus.

Sebab, apabila pihak eksekutif dan pihak legislatifnya sama-sama kompak untuk melakukan penggelembungan anggaran, maka dapat dipastikan bahwa tindakan itu tak akan diketahui oleh orang banyak. "Kalau disetujui, semuanya lancar. Tidak ada masyarakat yang tahu karena semua dibahas sesuai prosedur secara bersama-sama, tidak ada aturan yang dilanggar," cetusnya. **(wok)**